

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. ALI KUNCORO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA**
3. NHK : **829748**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 3.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m²/60 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1282 m²/800 m² di KAB / KOTA MOJOKERTO, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m²/45 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 742 m²/250 m² di KAB / KOTA KEDIRI, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 82.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, VESPA ZIP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, VESPA SPINT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. ---

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 3.782.000.000

III. HUTANG

Rp. 2.110.500.000



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.671.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.